

Erza Riani

From: Zulkifli Djamaluddin
Sent: 07 July 2022 15:15
To: Slamet Nur Dwiaryanto; Ardhiatama Kusuma Putra; Mochamad Randy Pradana; Rizky Armanda; Arie Wicaksono; Hifni Azan; Erza Riani; Priscillia Augie; Bella Rizky
Cc: Heru Hermawan
Subject: Visit & Discussion with LKPP Jakarta

Dear Team, terima kasih sudah join teams discussion siang ini, semoga kita semua sudah satu pemahaman dan dapat memberikan support yang terbaik bagi team sales, khususnya dalam transaksi LKPP.

Beberapa point yang perlu next action :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prosentasi % nilai kewajaran keuntungan oleh Penyedia | Hifni A |
| 2. Pemahaman team sales terkait proses transaksi LKPP dari Inicial Lead s/d approval kontrak dan invoice | Pepa/Ari/ Legal Team |
| 3. Ada dokumentasi yang proper dalam setiap event LKPP | Pepa/Ari |

Rgds

Zulkifli Djamaluddin (Pepa)

Market Development Power Systems

PT Trakindo Utama

Head Office

TMT 1 Building, 12th Floor

Jalan Cilandak KKO No.1, Jakarta 12560, Indonesia

Tel: +62 21 782 2373, 2997 6620 Ext. 1240 • Mobile: +62 811 4900364

Fax: +62 21 782 2357, 2997 6612

www.trakindo.co.id

Call Center 1500 228

Facebook • LinkedIn • YouTube: PT Trakindo Utama

Instagram: @trakindoutama

ADVANCING YOU FORWARD[®]

A member of **Tiara Marga Trakindo**

Dear mas Heru, terlampir beberapa catatan diskusi dengan LKPP Jakarta.

1. Harga tayang e katalog nasional LKPP saat ini tidak mengikat, final price ditentukan dalam negosiasi antara Penyedia dan PPK/ Dinas.
2. Harga per unit/ model yang dijual ke pemerintah harus sama untuk model dan quantity yang sama, jika ada yang berbeda maka kita harus punya jawaban dan data yang jelas kenapa beda.
3. Harga yang disepakati oleh Penyedia dan PPK adalah harga terbaik dari sisi bisnis, yang artinya harus ada keuntungan yang wajar (tidak ada klausul yang membatasi berapa % nilai kewajarannya, tingkat kesulitan Penyedia dalam menyiapkan barang tersebut dan term of payment tentu ada cost of business.
4. *"Harga jual di retail/ swasta harus lebih mahal dari harga jual ke pemerintah"*, klausul ini sudah tidak ada lagi di katalog Nasional LKPP,

Swasta/Retail bukan bagian yang diaudit oleh BPK dan secara bisnis Trakindo bisa menjelaskan kenapa lebih murah, misalnya secara quantity lebih banyak dan atau ada kontrak kerjasama dengan customer swasta tersebut.

5. Harga tayang di e katalog saat ini dapat kita rubah sewaktu waktu sesuai kebutuhan (perubahan kurs dollar) tidak perlu ada persetujuan LKPP Jakarta karena memang kita tidak ada kontrak payung untuk harga tayang di e katalog. Sedangkan untuk penambahan model/ unit yang tayang harus sepengetahuan team LKPP (ada form yang harus diisi dulu)
6. Saat ini LKPP lagi focus untuk Katalog Daerah, semua daerah Kabupaten/Kota diwajibkan harus punya katalog daerah. Ada perintah dari Kepala LKPP yang baru : Abdullah A Anas bahwa semua pengadaan barang di pemerintahan didorong sepenuhnya menggunakan e katalog (hanya special paket yang menggunakan tender).
7. Pemerintah hari ini dan kedepan mengutamakan pengadaan barang via e katalog, baik katalog Nasional LKPP, Sektoral Kementerian maupun Lokal/ Daerah
8. LKPP menyambut baik pelaksanaan LKPP event Sharing Session PT Trakindo dan akan bekerja sama untuk kebutuhan Narasumber